

Dr. Drs. Nengah Aryanatha, M.Ag
I Nyoman Sueca, S.Ag.M.Pd

NITI SASTRA



SELARAS

NITISASTRA

Penulis : • Dr. Drs. Nengah Aryasatha, M.Ag
• I Nyoman Sueta, S.Ag, M.Pd

Layout dan Sampul: Tim Penerbit Setara
@anggrah 2015

Diterbitkan oleh:
Penerbit Setara
Pesra, Pesra Graha Awi A-11
Malang 65134
Tlp: 0341-940508
Anggrah KAP

Hak cipta dilindungi undang-undang

Jumlah : viii + 701 dm.
Ukuran : 15,5 x 23 cm
Cetakan 1 : Februari 2015

ISBN : 978-602-8299-35-0

Sesuai Perundangan Pasal 22
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara maksimal paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, memperdekan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dilarang keras menjeremahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, atas arung wara nugraha Nya buku yang berjudul "Niti Sastra" ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Penulisan ini tersusun sebagai ucapan terimakasih penulis kepada semua pihak :

1. Dr. Ni Putu Lestiwati, SE., Ak, MM, selaku Ketua STAHN Gde Pudja Mataram yang telah banyak memberikan motivasi terhadap penulisan buku ini.
2. Dr. I Nyoman Wiyana, S.Sos., M.Si., M.Pd selaku Ketua Jurusan yang telah banyak memberikan dorongan moral terhadap penulisan buku ini.
3. Teman-teman dosen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.
4. Keluarga besar penulis yang sudah banyak membantu dan mendukung atas terselesaikannya penulisan buku ini.
5. Ketua dan sekretaris P3M STAHN Gde Pudja Mataram atas informasi yang telah diterima oleh kami.

Penulis menyadari bahwa buku "Niti Sastra" ini kurang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi kepentingan pengembangan ilmu Agama sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa STAHN Gde Pudja Mataram.

Mataram, 17 Maret 2015

Tim Penulis



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4
Telpon: 3812232, 3811504, 3811227 Jakarta 10710

SAMBUTAN

Om Swastyasti

Dalam rangka memenuhi kebutuhan buku referensi bahan ajar Agama Hindu di Perguruan Tinggi, diterbitkan buku Nitisastra sangat dibutuhkan, karena buku ini merupakan salah satu referensi kitab-kitab ilmu kepemimpinan. Buku Nitisastra ini memuat konsep kepemimpinan yang menarik untuk dibaca. Buku ini diharapkan sebagai pegangan atau pelengkap Pendidikan Agama Hindu, khususnya di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Padja Mataram. Melalui konsep pemerintahan yang diajarkan dalam buku ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk memahami ajaran Agama Hindu Bidang politik, tata negara, ekonomi dan budaya. Buku kajian teka asli dan sejarahnya dalam bahasa Indonesia kiranya dapat dimahakan.

Dengan diterbitkannya buku Nitisastra ini kepada para mahasiswa dan general muda Hindu kiranya diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman dan penghayatan terhadap konsep kepemimpinan menurut agama Hindu, yang pada akhirnya dapat mengamalkannya dalam hidup berbangsa dan beragama.

Akhirnya kepada para penyemah dan penulis, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas hasil yang karya mulia ini, dan kami menyambut baik kehadiran buku ini untuk selanjutnya disebarluaskan kepada umat Hindu.

Om Swasti, Swasti, Swasti

Jakarta, Februari 2019

Prati Bimar Hindu



Prof. Dr. Ngah Widya, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19620810 198303 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Sambutan	vi
Daftar Isi	vii

BAB I SEJARAH MUNCULNYA NITISASTRA	1
A. Sejarah Perkembangan Ilmu Nitisastra	1
B. Tempat Muncul dan Perkembangan Nitisastra	3
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP NITI SASTRA	8
A. Pengertian	8
B. Kitab Upaweda	9
C. Ruang Lingkup Nitisastra	12
BAB III FUNGSI NITISASTRA	25
A. Tujuan Mempelajari Nitisastra	25
B. Manfaat Nitisastra dalam Pembinaan Agama Hindu di Indonesia	26
C. Nitisastra dan Pembangunan Bangsa	29
BAB IV LAPANGAN NITISASTRA	33
A. Lapangan Politik	34
B. Tri Weda	35
C. Tri Warga	36

BAB V TERBENTUKNYA NEGARA MENURUT	
NITISASTRA	40
A. Pengertian Pokok Tentang Asal Kata Negara	40
B. Unsur Pembentukan Negara	40
C. Asal Mula Terjadinya Negara	45
D. Fungsi dan Tujuan Negara	48
E. Gana Rajya	52
BAB VI NITISASTRA DALAM KEHIDUPAN	
BERMASYARAKAT	54
A. Pengertian	54
B. Pengelompokan sosial masyarakat Hindu ...	58
Daftar Pustaka	69

BAB I SEJARAH MUNCULNYA NITISASTRA

A. Sejarah Perkembangan Ilmu Nitisastra

Nitisastra sebagai ilmu yang berdiri sendiri, dalam perkembangannya sebagai ilmu, mulai tahun 350 S.M di Kerajaan Magada (India). Tokoh yang berperan dalam perkembangan Nitisastra sebagai ilmu pemerintahan adalah seorang Brahmana yang bernama Chanakya atau Kautilya. Pada tahun 350 S.M, kerajaan-kerajaan yang ada di India secara terus menerus mendapatkan serangan dari bangsa Parsi yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar Iskandar Zulkarnaen. Diantara kerajaan-kerajaan yang mendapatkan serangan dari bangsa Parsi, yang paling parah adalah kerajaan Magada. Ketika serangan berlangsung, dimana mahkota Raja Magada yang bernama Chandra Gupta secara diam-diam mengasingkan diri dan berkonsolidasi kekuatan untuk mengalahkan penjajah dari bangsa Parsi.

Chandra Gupta putra mahkota dari raja Magada dalam menghimpun kekuatan didampingi oleh Maha Resi yang bernama Chanakya atau Kautilya. Atas bimbingan Kautilya, Chandra Gupta berhasil menegakan kehormatan kerajaan Negara Magada yang telah dilakukan secara mendasar dan Kautilya disamping sebagai perdana Menteri pada waktu itu, beliau juga sebagai konseptor di kerajaan Magada.

Konsep penataan sistem pemerintahan kerajaan Magada sepenuhnya dilakukan oleh Chanakya atau Kautilya, dan teorinya itu diakhiri menjadi suatu ilmu yang disebut dengan Arthasastra. Teori pemerintahan Hindu yang disusun oleh Kautilya telah dibukukan menjadi enam jilid yang disebut "Kautilya Arthasastra". Arthasastra ini sebelumnya lebih populer disebut dengan istilah "Danda Niti", dan juga pernah disebut

dengan Raja Dharma Raja Niti. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Nitisastra adalah ilmu pemerintahan yang berorientasi pada ajaran Agama Hindu. Juga diartikan bahwa Nitisastra merupakan sumber pemerintahan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
2. Tujuan dari mempelajari Nitisastra ialah untuk mengenal, mengerti, dan memahami tata susunan masyarakat Hindu pada umumnya dan tata negara Hindu khususnya dari masyarakat Hindu di India sampai masuk ke Indonesia guna dipakai pedoman pembinaan politik nasional pada jaman Majapahit.
3. Nama lain dari Nitisastra itu secara keseluruhannya, berarti ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan yang berorientasi pada Agama Hindu. Nama lain Nitisastra misalnya:
 - a. Danda Niti: berasal dari kata "Danda dan Niti". Danda yang diartikan adalah tongkat dalam hal ini disebut hukum, sedangkan Niti diartikan menuntun, dituntun, dibimbing. Sehingga Danda Niti dapat diartikan ilmu pengetahuan yang lebih menekankan sendi-sendi hukumnya, atau pemerintah berfungsi mengatur kehidupan manusia.
 - b. Arthasashtra ; berasal dari kata "Artha dan Sastra". Artha berarti tujuan atau artha benda dan sastra berarti ilmu pengetahuan atau hukum. Jadi Arthasashtra lebih menekankan pada pengertian bahwa Negara itu berfungsi mengatur kehidupan bangsa untuk mencapai kemakmuran.
 - c. Raja Dharma: berasal dari kata "Raja dan Dharma". Raja berarti pengendalian atau perintah sedangkan Dharma berarti dalam hal ini lebih tepat diartikan kewajiban. Dengan demikian Raja Dharma berarti ilmu pengetahuan yang menguraikan tentang kewajiban-kewajiban perintah (Raja)

- d. Raja Niti: berasal dari kata "Raja dan Niti". Raja berarti perintah dan Niti berarti pemimpin. Jadi Raja Niti lebih menekankan ilmu kepemimpinan dari pada pemerintah atau Raja.

Seorang sarjana yang bernama Goshal membedakan pengertian Danda Niti dengan Arthasashtra. Dimana Danda Niti lebih menekankan pada sendi-sendi hukum pemerintahan Negara. Sedangkan Arthasashtra lebih menekankan, pada Artha. Artha disini diartikan wilayah. Jadi Arthasashtra lebih menekankan segi pengaturan wilayah. Dimana hidup memerlukan artha sebagai jaminan hidup dan perlindungan.

B. Tempat Muncul dan Perkembangan Nitisastra

Sebelumnya sudah diuraikan bahwa Nitisastra pertamatama muncul di Kerajaan Magada (India) ± 350 S.M. Semenjak Magada memiliki Nitisastra sebagai landasan pembinaan negaranya, Magada menjadi Negara yang kuat. Di sinilah awal mulanya ajaran-ajaran Agama secara nyata dipakai dasar untuk membangun kehidupan bernegara. Dimana ajaran-ajaran Agama sudah diintegrasikan sedemikian rupa dengan ilmu pengetahuan. Sehingga pemerintah kerajaan memancarkan sinar keagamaan dalam membimbing rakyatnya mencapai kebahagiaan hidup. Peraturan-perundangan demikian pula, tingkah laku dari pada aparat pemerintah kerajaan selalu sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma. Demikian pula masyarakatnya semakin mendapat bimbingan dari Rajanya untuk berbuat, menurut petunjuk-petunjuk kitab sucinya.

Atas usaha ini terjadilah suatu keserasian antara kepemimpinan dengan kepengikutan, Pemimpin dihormati oleh pengikutnya. Pengikut mendapatkan perlindungan dari pemimpin. Di Bali dan Jawa keserasian antara pemimpin (Raja) dengan rakyatnya terkenal dengan istilah "mansinggalnya antara Kawula dengan Gusti".

Keberhasilan dari pada Nitisastra dalam memperkuat Negara, kerajaan-kerajaan Hindu di India mengembangkan sistem pemerintahan yang berorientasi Agama, dan semenjak itu kerajaan-kerajaan Hindu di India semakin kuat sehingga bangsa-bangsa lain tidak lagi mampu untuk menyerangnya.

Kerajaan-kerajaan Hindu dalam menerapkan teori-teori pemerintahan yang berorientasi dengan Agama Hindu selalu meletakkan unsur-unsur Indonesia asli sebagai faktor yang dominan dalam membentuk nilai-nilai moral Hindu dalam membina kehidupan bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pemimpin dengan rakyat menurut konsep Hindu harus bersatu, persatuan antara Pemimpin Negara dengan Rakyat akan terjadi apabila Pemimpin Negara bertindak berdasarkan hukum, dan rakyat selalu dibina untuk mentaati hukum. Menawadharmasastra Bab VII, 17, 18, 19, 20, 22 dan 24 menguraikan bahwa pemimpin atau Kepala Negara dan rakyat harus berbuat berdasarkan hukum.

Sloka-sloka tersebut berbunyi sebagai berikut;

17. *Sa rājā puruso danda sa netā -āsītā ca sah, catur
nāma-rūmanam ca dharmasya prasiddhāh smrah.*

Artinya:

Hukum adalah suami bagi Raja, yang mengatur hal-hal dari penguasa, dan itu disebut kepastian bagi keempat tingkat hidup yang tunduk kepada undang-undang

18. *Danda -āsti prajāh sarvā danda evābhīraksati, danda
supreṣū jīgati danda dharmam vidur bulbhak.*

Artinya:

Hukum itu sendirilah yang memerintah semua makhluk, hukuman itu sendirilah yang melindungi mereka, hukuman yang berjaga selagi orang tidur, orang-orang bijaksana menyamakannya dengan dharma

19. *Samiksya sa dhītah samyaktarvā -rahjayati prajāh,
asamiksya pranīhastu vindayati sarvatah.*

Artinya:

Bila (vonis itu) diberikan terhadap seseorang setelah mempertimbangkan, (hal) itu akan menjadikan orang-orang bahagia, tetapi memvonis tanpa pertimbangan akan menghancurkan segala galanya.

20. *Yadi na pranayendrijā dandam da-*

*aycwa tandritah, -ile matsyantiwa pakṣyan -darbalan
balawattarāh.*

Artinya:

Bila Raja tidak menghukum, dengan tidak jemu-jemunya kepada orang yang patut dihukum, maka yang kuat akan melalap yang lemah, seperti ikan dalam tempatnya.

22. *Sarvā dandajito loka -hi cucimaraṅgā, dandasya -hi
bhayātsarvām jagadbhogya kalpate.*

Artinya:

Seluruh dunia dipelihara dalam aturan, oleh karena hukum, karena orang yang tak bersalah sukar untuk didapat: oleh rasa takut akan menghukum, seluruh dunia memberi kenikmatan seseorang atau korbannya.

24. *Dacyeyan sarvawatnā-ca bhīdyeransarmasetawah,
sarvalobagnrahopā-ca bhawed dandasya vibhramāt.*

Artinya:

Semua golongan akan kacau, semua larangan akan dilanggar dan semua manusia barang satu dengan yang lain, akibat karena kesalahan terhadap hukuman.

Demikian pula kalau kita perhatikan di Indonesia Negara-negara pada zaman Hindu yang memperoleh kejayaannya, apa

bila pemerintah dalam Negara itu bertindak berdasarkan hukum, bukan berdasarkan emosi pribadi semata-mata. Kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya karena kitab hukum Hindu yaitu Manawadharmasastra diambil dan disusun kembali sesuai dengan situasi dan kondisi Majapahit. Jadi kitab Menawadharmasastra tidak secara keseluruhan diterapkan, tetapi diambil pada bagian-bagian yang dianggap cocok. Oleh karena kitab Undang-undang Majapahit adalah merupakan penerapan antara Manawadharmasastra dengan situasi dan kondisi Majapahit sebagai negara Nusantara. Hal ini telah memperkuat kerajaan Majapahit karena bersatunya atau kompaknya pemimpin Negara dengan Rakyatnya.

Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan terjadinya perpecahan dikalangan pimpinan Negara, dan perpecahan ini menyebar sampai kerakyat. Disamping itu perpecahan terjadi, karena masing-masing pihak tidak lagi taat akan peraturan hukum yang telah berlaku.

Dari uraian singkat dapat disimpulkan bahwa Nitisastra dalam pengembangannya mengarah pada bentuknya Negara hukum yang demokratis, artinya negara itu dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu berdasarkan hukum untuk memenuhi tuntutan hati nurani rakyatnya (Purusartha). Dalam ceritra Ramayana, di kerajaan Ayodya terdapat dua tipe pemerintahan yang sangat berlawanan yaitu pemerintahan Rama dan pemerintahan Rahwana, dimana pemerinatahan Rama dalam menjalankan kepemimpinannya selalu berpegang pada hukum, dan mereka berbuat untuk rakyat. Pada pemerintahan Rahwana sebagai pemimpin di kerajaan Alengka dalam menjalankan pemerintahannya tidak pernah berdasarkan Hukum, semata-mata bertindak menurut nafsunya sendiri, dan mereka memerintah bukan untuk rakyatnya, tetapi untuk kepentingan pribadi. Dua karakter pemerintahan ini dapat kita ambil sebagai ilustrasi, bahwa Rama pada saat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan idealisme yang terkandung dalam Nitisastra berhasil dengan kemenangannya, sedangkan Rawana tidak menggunakan Nitisastra sebagai dasar

pemerintahannya, sehingga menemui kehancuran. Dalam pengertian ini dapat dijelaskan bahwa pengembangan Nitisastra berarti mengembangkan prinsip-prinsip moral agama sebagai landasan bertindak bagi pemerintah negara (pemimpin).

Daftar Pustaka

- Astana, Made dan Anomdiputra C.S.2003. *(Penerjemah, Arthastra)*
- Adia Wiratmaja, 1977. *Leadership : Kepemimpinan Hindu*, Surabaya:Paramita
- Agung oka, 1976. *Nitisastra*, Denpasar: Kantor Wilayah Dep. Agama RI
- Dharmayasa, 1972. *Canakya Niti Sastra*, Dep. Agama RI
- Ghoshal, *A History of Indian Political Ideas.*
- Mimbeng, I Gede, dkk.1977.*Kakawin Nitisastra dan Putra Sesana*. Mataram: Kanwil Departemen Agama Propinsi NTB.
- Pudja MA dan Tjokcorda Rai Sudharta MA, 2003. *Manawa Dharma Sastra atau WedaSmerti*. Jakarta : CV.Pelita Nusantara lestari
- Parisada Hindu Dharma Pusat, 1982/1983. *Niti Sastra dalam bentuk kekawin* Jakarta: Hanuman Sakti
- Pasek, Wiana, dkk 1982. *Niti Sastra Proyek Pembinaan Mutu Pendidikan Agama Hindu dan Budha*, Dep. Agama RI.
- Sutedja, Mertah BA, 1978.*Dasar-- dasar kepemimpinan Tradisional Di Bali*, CV, Sumber Mas Bali
- Sudharta, 1992. *Asta Brata dalam Pembangunan*. Jakarta: Prasasti
- Subramaniam, Kamala (Alih Bahas: Paramita IGA Dewi), 2003. *Mahābhārata*. Surabaya: Paramita
- Tim Penyusun, 1994. *Buku Pelajaran Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Hanuman Sakti.

- Tim Penterjemah, 2001. *Kekawin Rāmyana I*. Denpasar: Departemen Agama RI Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali.
- Tim Penterjemah, 2001. *Kekawin Rāmyana II*. Denpasar: Departemen Agama RI Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi Bali.
- Titib, I Made, 1998. *Weda Sabda Suci (Pedoman Praktis Kehidupan)*. Surabaya: Paramita
- Titib, I Made, 1993. *Nitisastra*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu Budha dan Universitas Terbuka
- Tim Penyusun, Buku Pedoman Dosen Agama Hindu, Hasil Rumusan
- Wadrana, 1985. *Konsepsi Penerapan Kepemimpinan Asta Brata dalam peningkatan pelaksanaan Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha*, Kantor Wilayah. Departemen Agama Propinsi Jabar.

Nitisastra berasal dari dua buah kata yaitu Niti dan Sastra. Menurut kamus Sansekerta susunan AA Macdonel, Niti berarti kebijaksanaan duniawi (worldly wisdom), etika sosial politik, niti juga berarti menuntun.

Sastra diartikan juga juga berarti pujaan (praise). Dalam kamus Jawa Kuno susunan Mordwarso, Niti berarti kelakuan, pedoman hidup, kesopanan, dasar negara (kebijakan) politik, ilmu tata negara, sedangkan sastra berarti kitab pelajaran atau ilmu pengetahuan.

Nitisastra yang merupakan suatu istilah diartikan oleh Macdonell dalam kamusnya yaitu Science of Political ethics (ilmu tentang etika politik). Pandangan DR. Rajendra Mishra menjelaskan pengetahuan Niti Sastra adalah upadesa karya yaitu karya sastra yang bersifat mendidik, menuntun atau membimbing. Nitisastra berasal dari kata Niti dan Sastra. Niti berasal dari kata ni + kata ti, menjadi niti. Niyato Anaya ti niti. Berarti dibimbing, dipimpin, dituntun ke arah kebijaksanaan dunia, kejalan kebenaran, dituntun ke arah cinta bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian etimologis di atas maka pengertian Niti Sastra dapat diperluas lagi menjadi ilmu yang bertujuan untuk membangun suatu negara baik dari tata negaranya, tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan (dhanna negara). Bahwa Niti Sastra juga mengandung ajaran kepemimpinan juga bersifat umum dan praktis berlandaskan ajaran Agama Hindu. Dan Nitisastra ini bukanlah ilmu pengetahuan yang hanya untuk kalangan negarawan atau politisi saja tetapi juga untuk setiap orang, dalam rangka memantapkan Pancasila dan UUD 1945.



SELARAS

Penerbit Selaras

Anggota IKAPI Jatim

Perum Pesona Criya Asri A-11

Malang 65134

ISBN 978-602-6299-35-0



9 786026 299350